

**PERUBAHAN KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* AMERIKA SERIKAT
TERHADAP PERDAGANGAN OPIUM DI AFGHANISTAN PADA MASA
PEMERINTAHAN OBAMA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

**BAYU SAPUTRA
NIM. I72217066**

**PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2021**

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bayu Saputra

NIM : I72217066

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Perubahan Kebijakan *War on Drugs* Amerika Serikat Terhadap Perdagangan Opium di Afghanistan pada Masa Pemerintahan Obama

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

- 1). Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik
- 2). Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3). Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 18 November 2021

Yang menyatakan



Bayu Saputra

NIM. I72217066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

NAMA : Bayu Saputra

NIM : I72217066

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul: **Perubahan Kebijakan *War on Drugs* Amerika Serikat terhadap Perdagangan Opium di Afghanistan pada Masa Pemerintahan Obama**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat disajikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 18 November 2021



Pembimbing

Moh. Fathoni Hakim, M.Si

NIP. 198401052011011008

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Bayu Saputra dengan judul: “Perubahan Kebijakan *War on Drugs* Amerika Serikat terhadap Perdagangan Opium di Afghanistan pada Masa Pemerintahan Obama” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 14 Januari 2022

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Penguji II



Zaky Ismail, M.Si
NIP. 198212302011011007

Penguji III



Rizki Rahmadini Nurika, MA
NIP. 199003252018012001

Penguji IV

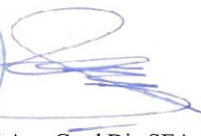


Ridha Amaliyah, S.IP, MBA
NUP. 201409001

Surabaya, 14 Januari 2022

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA, M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bayu Saputra
NIM : I72217066
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional
E-mail address : baysaputraa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERUBAHAN KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* AMERIKA SERIKAT TERHADAP
PERDAGANGAN OPIUM DI AFGHANISTAN PADA MASA PEMERINTAHAN
OBAMA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2022

Penulis

(Bayu Saputra)

ABSTRACT

Bayu Saputra, 2021. *Alteration in the United States of America War on Drugs Policy towards the Opium Trade in Afghanistan during the Barack Obama Administration*

This reserach aims to explain the factors that influence the alteration in the United States (US) *War on Drugs* policy towards the opium industry that mushroomed in Afghanistan during the Obama administration. In this research, researchers used qualitative research methods with explanatory types and used data obtained from interviews, literature studies, and internet sources. The researcher used the theory of the Foreign Policy Decision Making Process which was initiated by William D. Coplin with a focus on the nation-state level of analysis. The results showed that the alteration of US War on Drugs policy occurred at the level of *program changes*. The alteration of US War on Drugs policy towards the opium trade in Afghanistan during the Obama administration was influenced by various factors. First, the emergence of the phenomenon of narco-terrorism between opium syndicates and the Taliban. Second, the discovery of a new distribution route through Africa that threatens US. Third, the dominance of Democratic Party cadres in the US political beurocracy. Fourth, the superiority of the US military in Afghanistan in terms of quantity and quality, supported by a good budget arrangement. And fifth, Obama's idiosyncratic influence as an open, rational and accommodative-cooperative decision maker. Referring to these factors, it can be concluded that the change in US *War on Drugs* policy towards the Afghan opium trade during the Obama administration was caused by situations and challenges that changed from time to time.

Keywords: *War on Drugs, United States of America, Afghanistan, Opium Trade*

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, dapat diketahui bahwa isu perdagangan opium di Afghanistan sejauh ini tetap menjadi permasalahan yang krusial bagi AS pada setiap periode kepemimpinan yang berbeda. Di tanah Afghanistan, krisis opium menjadi akar permasalahan kemiskinan, kesehatan dan instabilitas politik. Di samping itu, industri opium Afghanistan yang berskala global juga mengancam AS sebagai negara dengan jumlah pengguna narkoba terbesar di benua Amerika. AS tidak hanya berperang melawan terorisme, namun juga turut berperang melawan industri opium melalui kebijakan *War on Drugs*-nya. Pada penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu lebih lanjut apa yang mendorong perubahan kebijakan *War on Drugs* AS untuk Afghanistan pada era Obama. Pemilihan topik penelitian dilandasi ketertarikan peneliti akan krisis opium Afghanistan yang menjadi ancaman bagi kemanan manusia (*human security*), serta bagaimana negara adidaya seperti AS merespon krisis tersebut.

Maka dari itu, perubahan kebijakan *War on Drugs* AS yang terjadi pada masa pemerintahan Obama ini akan menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait faktor yang mendorong perubahan hingga dampaknya. Dengan banyaknya penelitian terdahulu yang mengkaji konflik Afghanistan dari perspektif *war on terror*, akan lebih menarik bila peneliti mencoba mengkaji konflik Afghanistan dari perspektif *War on Drugs*. Mengacu pada latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut perubahan kebijakan *War on Drugs* AS dalam memberantas perdagangan opium di Afghanistan pada masa pemerintahan Obama.

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “*Upaya UNODC Dalam Menangani Narco-Terrorism di Afghanistan Periode 2011-2014*” yang ditulis oleh Ribka Cimeta, mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Universitas Diponegoro. Dalam artikel jurnalnya, ia menganalisa upaya UNODC menggunakan teori liberalisme institusional. Ia mengemukakan bahwa sebagai institusi internasional, UNODC berkewajiban membuat suatu *country programme* dalam menyelesaikan problematika konflik terorisme dan perdagangan narkoba di Afghanistan. Dalam menjalankan suatu *country programme* tersebut, UNODC mengimplementasi empat sub-program lain: 1) *Research, Policy and Advocacy*, 2) *Law Enforcement Capacity Building*, 3) *Criminal Justice*, 4) *Health and Alternative Live hoods*. Penelitian Ribka Cimeta menemukan hasil bahwa dari berbagai program yang ada, UNODC terlihat lebih berfokus pada aspek publikasi penelitian dan penguatan institusi hukum di Afghanistan. Namun UNODC mengalami beberapa kendala dalam implmentasi kebijakannya. Kendala utama berasal dari kondisi keamanan Afghanistan itu sendiri. Karena besarnya jaringan perdagangan narkoba dan terorisme di Afghanistan, mengakibatkan kerjasama antara UNODC dan pemerintah lokal terhambat. Hambatan tersebut di antaranya: 1). kondisi tanah Afghansitan yang kering menghambat usaha UNODC dalam memperkenalkan pilihan alternatif tanaman lainnya kepada para petani, 2) Tingkat kemiskinan yang tinggi di antara masyarakat Afghanistan, 3) stabilitas politik yang rendah karena maraknya serangan teroris dan korupsi di badan pemerintah Afghanistan sendiri.

Kedua, sebuah buku yang berjudul '*Counterinsurgency in Afghanistan*' oleh Seth G. Jones. Dalam bukunya, Jones menulis bahwa ancaman non-tradisional di Afghanistan tidak hanya berasal dari Taliban, melainkan banyak pihak yang bekerjasama satu sama lain demi melengserkan pemerintahan demokratis Afghanistan. Di antaranya *Hezb-i-Islami*, *the Haqqani network*, suku-suku lokal, serta organisasi kriminal. Dalam bukunya, Seth G. Jones berargumen bahwa intervensi asing memang sangat diperlukan saat ini, mengingat kurangnya kapabilitas pemerintah Afghanistan dalam menyelesaikan permasalahan internalnya sendiri. Argumen ini didasari oleh pengalamannya sendiri ketika ia mengunjungi Afghanistan untuk mewawancarai polisi lokal dalam rangka riset. Ia menganggap bahwa para personel *Afghan National Police* masih banyak mempraktikkan korupsi, tidak kompeten, dan cenderung patuh kepada perintah komandan lokal alih-alih pemerintah pusat. Ini merupakan kesalahan bobrok yang struktural. Bagaimanapun polisi adalah lengan utama dari pemerintah dalam menekan kriminalitas, tetapi justru merugikan keseluruhan struktur. Maka dari itu kehadiran militer AS sangat diperlukan. Militer AS membuat perubahan signifikan dalam program pelatihan polisi yang dimulai pada tahun 2005 dan 2006. Namun ia memberi catatan bahwa intensitas intervensi AS juga harus dibatasi. Bagaimanapun pemerintah Afganistan dan pasukannya merupakan pihak yang paling bertanggung jawab menumpas pemberontakannya sendiri. Dalam banyak kasus, intervensi yang terlalu signifikan oleh pasukan militer AS dapat merusak dukungan rakyat dan legitimasi pemerintah Afghanistan.

Ketiga, skripsi yang berjudul '*Pengaruh Invasi Militer Amerika Serikat terhadap Proses Demokrasi di Afghanistan*' yang diteliti oleh Zaenal Arifin, mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsinya, ia mengemukakan hasil bahwa usaha Amerika Serikat dalam menciptakan iklim yang demokratis di Afghanistan belum tercapai karena adanya berbagai kendala. Pertama, Taliban dan Al-Qaeda yang masih aktif melakukan berbagai aksi terror di beberapa kota di Afghanistan. Kedua, kepercayaan rakyat Afghanistan yang masih rendah terhadap pemerintah sentral karena maraknya skandal korupsi dan sikap pemerintah Afghanistan yang masih bergantung pada bantuan asing dalam semua hal, baik politik, ekonomi maupun militer. Selain itu, adanya kelompok-kelompok milisi lokal (*warlords*) yang meraih kepercayaan masyarakat, membuat Afghanistan sulit untuk mengimplementasi sistem demokrasi barat. Zaenal Arifin sebagai peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya kompleksitas kehidupan dan sejarah dari Afghanistan sendiri, pada akhirnya akan sangat susah untuk berhasil menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Harapan satu-satunya dari Amerika Serikat yakni kapabilitas Hamid Karzai sebagai presiden Afghanistan terpilih pada tahun 2004. Tugas berat bagi Karzai untuk mendapatkan kembali kepercayaan rakyatnya, dan mampu mengendalikan serta berkompromi dengan para *warlords*.

Keempat, sebuah artikel jurnal penelitian dengan judul "*US Intervention in Afghanistan: Justifying the Unjustifiable*" oleh Leoni Connah dari University of Lancaster, UK. Dalam artikel jurnalnya, Leoni menganalisa intervensi AS di Afghanistan menggunakan teori '*Just war*'. Motif AS dalam intervensi ke

Afghanistan memang terlihat janggal. Dalam artikel jurnalnya, Leoni menjelaskan sekilas ihwal sejarah intervensi AS di Afghanistan. Untuk menjustifikasi visi *war on terror*, *United Nations Security Council* menyetujui '*war on terror*' dalam resolusi 1368. Namun dalam resolusi tersebut, tidak terdapat legitimasi terhadap tindakan invasi. Oleh karena itu, AS menghiraukan DK PBB dan secara sepihak memulai operasi militernya. Dalam Kongres ke-107, AS membentuk resolusi bersama *Authorisation for Use of Military Force* yang melegitimasi presiden untuk menggunakan semua kekuatan demi memerangi terorisme internasional. Leoni menjelaskan bahwa karakteristik intervensi AS di Afghanistan sesuai dengan karakteristik *jus ad bellum*. AS menggunakan nasionalisme dan agama untuk mengkonstruksi narasi dalam mendeklarasikan invasinya. Narasi 'Perang Salib' yang digunakan berulang kali oleh Bush dalam pidatonya telah membangkitkan gambaran historis tentang perang spiritual (*Holy War*) ala perang salib pada abad pertengahan. Retorika simbolis semacam ini mengangkat status moral rakyat AS, namun secara tidak sengaja juga mengakibatkan para kelompok jihadis menjadikan *War on Terror* sebagai magnet untuk bersatu melawan AS. Selain memberantas para pemberontak, konsentrasi AS juga terpecah untuk memberantas industri opium yang tumbuh subur di Afghanistan. Berbeda dengan argumen Seth G. Jones, Leoni Connah berargumen bahwa kebijakan larangan pemerintah AS sebenarnya semakin memperkuat pemberontakan Taliban. Jika tujuan AS memberantas narkoba untuk melemahkan Taliban di Afghanistan, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah melegalkan produksi opium sepenuhnya. Hal ini akan menurunkan harga opium, mengurangi manfaat

penggunaan kekerasan, dan sangat mungkin mengikis monopoli Taliban atas industri tersebut. Namun menurut peneliti sendiri, argumen Leone ini terkesan tergesa-gesa dan terlalu riskan untuk diimplementasi mengingat instabilitas pemerintahan Afghanistan sendiri.

Kelima, artikel jurnal yang berjudul *The War on Drugs in Afghanistan: Another Failed Experiment with Interdiction* yang ditulis oleh Christopher J. Coyne. Dalam artikel jurnal ini, Christopher J. Coyne menjelaskan konsekuensi-konsekuensi yang dapat diakibatkan dari interdiksi opium AS di Afghanistan. 1). *Ketidakpastian rezim di Afghanistan*. Dalam mengeksekusi operasi interdiksi, pemerintah AS perlu bekerjasama dengan para *warlords*. Efek kumulatif dari kerjasama ini dapat semakin memperkuat posisi *warlords* sebagai pemerintah otonom di setiap wilayah Afghanistan dan mendelegitimasi pemerintah sentral Afghanistan sendiri. 2). *Terciptanya kartelisasi*. Kartelisasi akan terjadi akibat manipulasi interdiksi AS untuk menyasar produsen opium yang berskala kecil. Dengan memberi informasi tentang keberadaan sindikat-sindikat opium berskala kecil, para *warlords* dan pejabat korup memanipulasi interdiksi AS untuk menyingkirkan persaingan opium. Hasilnya adalah produsen besar semakin berkembang pesat dan menciptakan kartelisasi. 3). *Korupsi*. Korupsi adalah hal yang umum di Afghanistan. Larangan nasional terhadap opium beserta kebijakan *War on Drugs* AS memaksa para petani maupun sindikat untuk meyuap sejumlah pejabat publik seperti: polisi, militer, hakim, birokrat dan sebagainya. Alih-alih bertugas dalam memberangus sindikat opium, para aktor penegak hukum ini malah menerima suap karena himpitan ekonomi.

Keenam, adalah buku yang berjudul '*Poppies, Politics, and Power*' oleh James Tharid Bradford dari Cornell University. Dalam bukunya, ia berfokus pada hubungan antara pemerintah Afghanistan dan berbagai proyek pembangunan negara, masyarakat, dan analisis sejarah opium di Afghanistan. Buku ini lebih menekankan pada kajian historis Afghansitan. Dalam kajiannya, pemerintah Afghanistan beberapa kali menghadapi lika-liku konflik hingga menjadi aktor kunci pengaruh blok barat dalam perang dingin saat Uni Soviet terusir dalam perang Afghan-Soviet (1979-1989). Konflik Afghanistan berlanjut dengan munculnya kelompok-kelompok pemberontak seperti Taliban yang menjadi salah satu faktor instabilitas politik Afghanistan hingga sekarang. Ketika narasi yang dibangun bahwa opium berkaitan dengan aksi terorisme di Afghansitan, Bradford malah menyatakan sebaliknya. Opium tidak berkaitan dengan terorisme, atau bahkan ketidakstabilan politik. Temuan yang menarik dalam buku ini adalah bahwa opium merupakan bagian yang lebih besar tentang kekuasaan politik, pembangunan negara, diplomasi, dan budaya Afghanistan. Selama seabad terakhir, opium adalah komoditas semi-legal yang diperdagangkan di pasar regional atau global. Terkadang dikenakan pajak sampai batas tertentu. Buku ini menjelaskan provinsi Helmand sebagai penghasil opium utama di Afghanistan menjadi alasan terbentuknya *The Helmand Valley Development Project* (HVDP). Proyek ini lahir dari hubungan diplomatic AS - Afghanistan setelah pelarangan opium pada tahun 1945. AS bertujuan membantu negara-negara berkembang seperti Afghanistan membangun jalan, bendungan, dan bentuk agro-industri lainnya. AS berharap dapat membawa Afghanistan ke pasar global, serta

memperkuat aliansi Perang Dingin. Hingga 1970-an, HVDP mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Pada tahun 1973, ketika Mohammad Daud Khan berkuasa, pemerintah Afghanistan terus menggaungkan perang melawan narkotika sebagai sarana untuk menghentikan perdagangan opium sekaligus memperlancar arus investasi AS. Terlepas dari kenyataan bahwa para petani mendapat manfaat dari penjualan opium ilegal, di sini paradoks mulai muncul. Para petani dan pedagang merasa diuntungkan dengan adanya opium, namun tidak diuntungkan oleh investasi AS. Pembangunan yang tidak merata serta alur pikir pemerintah sentral dan masyarakat Afghanistan yang tidak sejalan membuat opium selalu dipertahankan dan telah menjadi budaya dalam sejarah masyarakat Afghanistan.

Ketujuh, artikel jurnal yang berjudul *'Interests and Values in Obama's Foreign Policy: Leading from Behind?'* oleh De Castro Santos & Maria Helena. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa nilai dan kepentingan yang terkandung di setiap kebijakan luar negeri presiden Barrack Obama dari tahun 2009-2014. Dalam artikel jurnal ini, Santos & Helena menganalisa total 1.203 pidato yang disampaikan Obama dari tahun 2009 dan 2014. Analisa ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan setidaknya satu motif atau pembenaran intervensi militer AS di Afghanistan, Pakistan, Irak, dan Libya. Hasil dari analisa tersebut menyebutkan: konfirmasi prevalensi keamanan di antara motivasi pemerintahan Obama terhadap kebijakan luar negeri terkait negara-negara Timur Tengah menunjukkan bahwa 55% dari total referensi yang diidentifikasi terkait dengan keamanan, dengan 28% terkait dengan hegemoni

pemerintahan demokratis dan lembaga demokrasi liberal, dan 17% untuk bantuan kemanusiaan.

Kedelapan yakni artikel jurnal *The Obama Administration's New Counternarcotics Strategy in Afghanistan: Its Promises and Potential Pitfalls* yang ditulis oleh Vanda Felbab-Brown, seorang peneliti di Brookings Edu. Vanda Felbab-Brown merupakan akademisi juga peneliti yang berfokus pada kajian keamanan dan terorisme. Dalam artikel jurnalnya, Vanda memulai dengan penjelasan bahwa sepertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB) Afghanistan berasal dari budidaya dan pemrosesan opium menjadi heroin. Sehingga produksi opium ilegal menentukan keberlangsungan ekonomi sebagian besar penduduk Afghanistan. Dalam artikel jurnal ini Vanda menjelaskan fokus kebijakan *War on Drugs* baru bagi Afghanistan yang digadang-gadang akan lebih membuahkan hasil daripada kebijakan sebelumnya. Kebijakan baru Obama menekankan pada peningkatan pemberantasan (*Interdiction*) dan pembangunan alternatif (*Rural Development*). Vanda berargumen bahwa langkah Obama terlihat berusaha untuk mengintegrasikan strategi *counter-narcotics* dan *counter-insurgency*. Lebih jauh, Vanda memberikan kunci sukses akan berhasilnya kebijakan *War on Drugs* AS untuk Afghansitan yakni melalui: 1). *Security*, pemerintah AS-Afghansitan harus mengutamakan kendali penuh atas tiap-tiap provinsi di Afghanistan. 2). *Interdiction with the right focus*, yang dimaksudkan adalah interdiksi skala besar yang menargetkan seluruh jaringan dan berusaha untuk menghilangkan permintaan lokal untuk opium dari pedagang lokal. 3). *Comperhensive Rural Developments*, Pembangunan pedesaan yang komperhensif terletak pada inti dari

strategi baru ini. Pendekatan ini menurut Vanda memiliki peluang terbaik untuk secara efektif dan berkelanjutan memperkuat negara Afghanistan dan mengurangi ekonomi narkoba. Yang dimaksud pembangunan komperhensif dalam rural development adalah pembangunan sosial dan ekonomi berbasis luas yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan masyarakat pedesaan.

Kesembilan, sebuah jurnal *Understanding Taliban and Insurgency in Afghanistan* karya Thomas H. Johnson dan Chris Mason. Thomas H. Johnson merupakan professor di department keamanan nasional di Naval Postgraduate School of Monterey, California. Sedangkan Chris Mason merupakan pensiunan staf senior di the Ccenter for Advanced Defense Studies, Washington D.C. Dalam penelitian ini, mereka berfokus pada Taliban sebagai aktor yang mengancam keamanan nasional Afghanistan. Dalam jurnal ini dijelaskan struktur Taliban yang terdiri dari orang-orang etnis Pashtun dengan beberapa dukungan dari suku Kakar dari konfederasi Ghurghusht. Mullah Mohammed Omar Akhund dan sebagian besar anggota senior Taliban berasal dari suku Hotaki di Ghilzai. Gerakan mereka mewakili front Islam ultra-konservatif dengan ideologi yang berasal dari Sekolah Deobandi. Namun, Taliban mengimplementasi Deobandisme secara ekstrem. Seperti yang telah banyak dibahas di beberapa literatur, Taliban awalnya terdiri dari para mujahidin yang berjuang mengusir Uni Soviet dari tanah Afghanistan. Pasca hengkangnya Soviet, para faksi di Afghanistan saling berebut kekuasaan termasuk Taliban. Pada jurnal ini, peneliti memahami strategi *counter* Taliban yang cukup brilian dalam melawan AS. Pada malam hari, para mullah Taliban

mendatangi setiap desa, berbicara kepada para tetua. Secara tidak langsung, para mullah Taliban melakukan intimidasi terhadap para penduduk desa, mengancam akan membunuh penduduk desa jika pasukan AS telah pergi. Pada dasarnya Taliban meminta kerjasama dengan desa-desa di wilayah terpencil Afghanistan agar mau berada di pihaknya.

Kesepuluh, dalam buku *Cruel Harvest US Intervention in the Afghan Drug Trade* karya Jullien Mercille. Buku ini membahas kebijakan *War on Drugs* AS melalui dua perspektif; yakni konvensional dan kritis. Melalui perspektif konvensional, *War on Drugs* diimplementasi di Afghanistan karena pemerintah AS dan militer khawatir akan menjamurnya opium mengingat opium merupakan tanaman yang adiktif dan berbahaya. Alasan ini menjelaskan aksi pemerintah AS yang melakukan operasi pemberantasan opium sekaligus memerangi Taliban. AS menganggap Taliban sebagai aktor penting dalam industri opium karena keterlibatannya dalam melindungi ladang-ladang opium di Afghanistan. Di satu sisi, melalui perspektif kritis, Jullien Mercille menjelaskan bahwa alasan sebenarnya dari *War on Drugs* AS di Afghanistan adalah karena kepentingan politik ekonomi AS semata. Sebenarnya AS tidak begitu peduli dengan krisis opium di Afghanistan. Di antara kepentingan tersebut yakni perluasan pasar dan peluang investasi yang secara mendasar menjaga iklim ekonomi dan politik global yang “sehat” dan kondusif untuk pelaksanaan tujuan tersebut. Secara geopolitik, kontrol atas wilayah strategis di Eurasia cukup berarti bagi AS untuk melawan pengaruh Rusia dan Tiongkok di benua itu.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan banyak yang membahas kebijakan kontra-narkotika AS di Afghansitan secara spesifik, contohnya penelitian dari Vanda Felbab-Brown yang berfokus membahas kebijakan Obama dan resikonya di masa depan. Namun, peneliti belum menemukan penelitian eksplanatif yang menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan *War on Drugs* AS di Afghanistan pada masa pemerintahan Obama. Pada akhirnya, penelitian dengan judul ‘Perubahan Kebijakan *War on Drugs* Amerika Serikat terhadap Perdagangan Opium di Afghanistan pada masa pemerintahan Obama” ini merupakan penelitian dengan pembaharuan topik sejenis. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan peneliti di atas memiliki relevansi terkait topik penelitian ini, namun belum ada satupun yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini sehingga penelitian ini layak untuk diteruskan.

F. Argumentasi Utama

Dalam penelitian yang berjudul “Perubahan Kebijakan *War on Drugs* Amerika Serikat terhadap Perdagangan Opium di Afghansitan pada masa pemerintahan Obama”, peneliti berargumen bahwa perubahan kebijakan *War on Drugs* AS dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Beberapa faktor yang mendorong perubahan di antaranya: pertama, munculnya fenomena narkoterisme di antara sindikat opium dan Taliban. Kedua, ekspansi jalur distribusi opium Afghanistan melalui Afrika yang mengancam AS sebagai pasar potensial. Ketiga, pengaruh kader Partai Demokrat yang menguasai mayoritas

Nixon dalam mendeklarasikan 'War on Drugs' untuk menentukan sikap dari strategi anti-narkotika bagi masa depan AS.

Dalam konteks penelitian ini, krisis opium di Afghanistan menjadi subjek sasaran kebijakan *War on Drugs* AS sejak era pemerintahan George W. Bush. Karena gejolak konflik dengan Taliban di Afghanistan, pada saat yang bersamaan peran militer AS diubah secara signifikan untuk menyelaraskan inisiatif kontra-narkotika dengan upaya kontra-pemberontakan. Dari tahun 2004 dan 2005, *Departement of Defense* melipatgandakan lebih dari tiga kali lipat anggaran operasi yang didedikasikan untuk kontra-narkotika dari \$72 juta menjadi \$225 juta. Pentagon mengubah aturan untuk mengizinkan pasukan AS untuk terjun bersama DEA dan *Afghan Special Narcotics Forces* dalam operasi kontra-narkotika di lapangan.

2. Pemberantasan Narkotika

Mengutip dari situs resmi *Drugs Enforcement Administration* (DEA), pemberantasan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan upaya menghancurkan atau mengurangi kuantitas dari industri perdagangan opium. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, penelitian ini mengambil negara Afghansitan sebagai variabel yang merupakan negara dengan produksi opium terbesar di dunia. Mengacu pada definisi DEA, terdapat tiga metode pemberantasan narkotika dalam penelitian ini. Pertama yakni eradikasi (*eradication*), yaitu upaya pemusnahan lahan

Dalam berbagai kajian politik luar negeri, telah diketahui bersama bahwa keputusan luar negeri tidak bisa lepas dari pengaruh kepribadian individu pengambil keputusan itu sendiri. Dalam *Foreign Policy Analysis: Classic & Contemporary Theory*, era kontemporer memunculkan paradigma kognitivistis baru yang dibangun di atas kemajuan studi psikologi sehingga mulai menghasilkan sub-bidang interseksional dalam disiplin lain, termasuk studi politik internasional.³⁴ Dalam bukunya, Coplin menganggap bahwa manusia adalah pemecah masalah yang rasional. Paradigma semacam ini memajukan pemahaman tentang bagaimana karakteristik individu pemimpin dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Coplin menyebut peran kepribadian ini sebagai ‘variabel idiosinkratik’.³⁵

Setiap tindakan pemimpin pasti terdapat dorongan psikologis tertentu pada dirinya. Pada variabel psikologis pemimpin, konsep citra (*image*) merupakan konsep yang penting dalam analisa. Citra timbul dari berbagai interaksi dari sikap dan asumsi yang dikembangkan seseorang dalam mempelajari lingkungannya. Citra dapat dibedakan menjadi dua, yaitu **“citra terbuka”** dan **“citra tertutup”**. Citra yang terbuka menandakan sifat fleksibel atau progresif sedangkan citra yang tertutup cenderung

³⁴ Valerie Hudson & Benjamin Day, *Foreign Policy Analysis: Classic & Contemporary Theory*, (ROWMAN & LITTLEFIELD, 2020), 39.

³⁵ James N. Rosenau, *Pre-Theories and Theories of Foreign Policy*, dalam R Barry Farrel, ed., *Approaches to International and Comparative Politics*, Evanston, III.: (Northwestern University Press), 27 - 92.

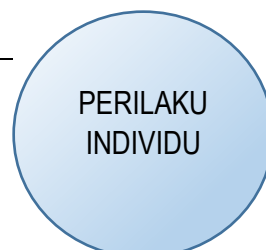
fallacy' merupakan sebaliknya di mana kesalahan metodologis yakni memakai generalisasi yang disimpulkan dari tingkat 'keseluruhan' untuk menjelaskan tingkat 'bagian'.⁴⁷

Menurut Mohtar Mas'ood, tingkat analisa dalam dalam penelitian ilmu hubungan internasional terdiri dari lima tingkat atau *level of analysis*, di antaranya: perilaku individu (*individual level*), perilaku kelompok (*group*), negara-bangsa (*nation-state*), pengelompokan negara-negara (*group of states*), dan sistem internasional (*international system*).



Gambar 3.1: Tingkat Analisa disiplin ilmu Hubungan Internasional (*Level of Analysis*)

⁴⁷ *Ibid.*, 40-42.



2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap inti di mana peneliti akan mengumpulkan data dengan metode studi literatur dan wawancara. Proses pengumpulan data meliputi membaca berbagai *official report* UNODC, SIGAR, Pemerintah AS, Afghanistan dan sumber lainnya. Selain itu peneliti juga mendapatkan data dari berita internasional, *press conference*, jurnal penelitian, hasil wawancara serta dokumen-dokumen valid lainnya.

3. Tahap Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data milik Miles & Huberman, yang mana meliputi tahapan analisis data: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

E. Teknik Pengumpulan Data

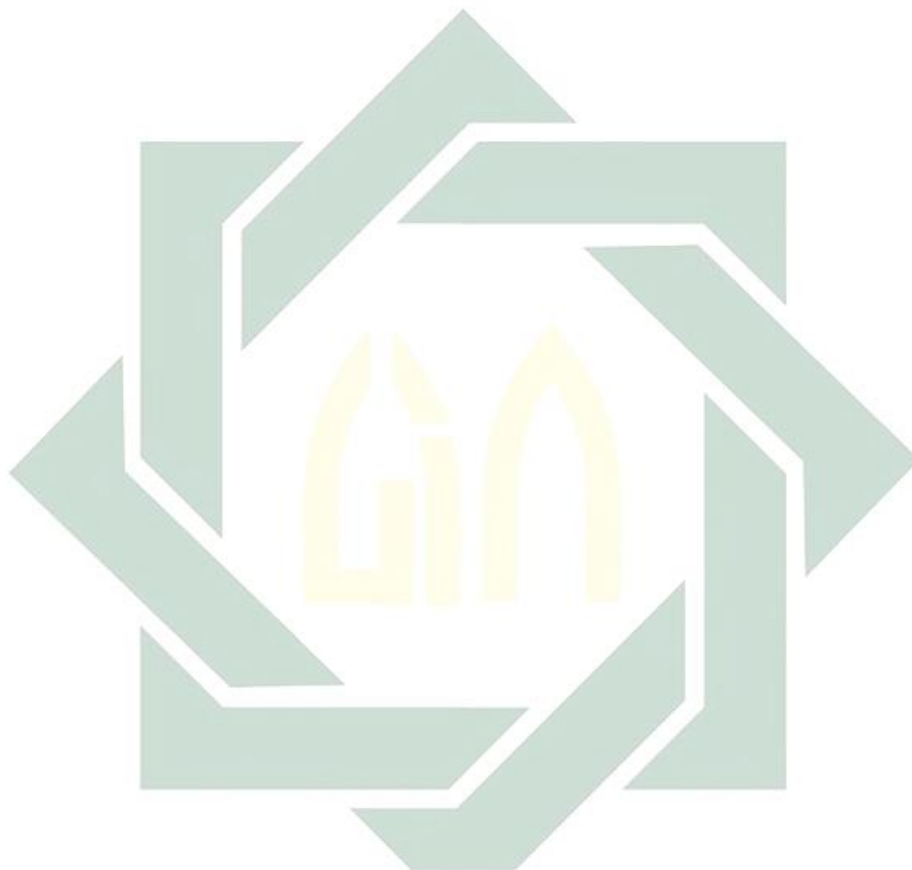
Peneliti menggunakan metode studi literatur dan wawancara untuk pengumpulan data pada penelitian ini. Data akan diperoleh dari berbagai macam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh berbagai instansi kredibel seperti *Drugs Enforcement Administration (DEA)*, *Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan*, *Special Inspector General for Afghanistan Assessment (SIGAR)*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, dan lain sebagainya. Data juga diambil dari *press release*, *official statement*, jurnal penelitian terdahulu, buku, serta berita online maupun offline. Untuk wawancara sendiri, peneliti menggunakan teknik

yang jelas kepada publik tentang komitmen yang dibutuhkan di Afghanistan dan Pakistan. 2). Pentingnya strategi kontra narkotika baru yang diintegrasikan dengan komponen kontra terorisme. 3). Administrasi harus mengembangkan system metrik yang jelas untuk menilai kemajuan di Afghanistan dalam urusan kontra-narkotika, keamanan, korupsi dan pembangunan ekonomi. 4). *Department of State* harus mengupayakan peningkatan kerjasama dengan Afghanistan untuk mengidentifikasi dan mendukung upaya penanggulangan narkotika regional yang lebih baik lagi. Secara khusus, Duta Besar Richard Holbrooke harus memimpin jalannya hubungan diplomatik untuk memperkuat kerja sama AS – Afghanistan 5). Mengirim lebih banyak warga sipil AS dengan keahlian di bidang pertanian, pembangunan, dan keterampilan teknis lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di Afghanistan.¹⁰⁴ Pada poin ke-4 dalam rekomendasinya, Senat menunjuk Richard Holbrook yang mana merupakan politisi partai Demokrat sebagai diplomat AS untuk wilayah Afghanistan dan Pakistan. Perlu diketahui bahwa Holbrook merupakan salah satu pejabat negara yang getol mengkritik kebijakan eradikasi Bush sebelumnya. Ia berkomentar bahwa kebijakan eradikasi merupakan kebijakan paling sia-sia dan tidak efektif yang pernah Ia tahu.¹⁰⁵

¹⁰⁴ 111th Congress, “Afghanistan’s Narco War: Breaking the Link between Drug Traffickers and Insurgents”, Wahington: U.S Government Printing Office, 2009, 23-25.

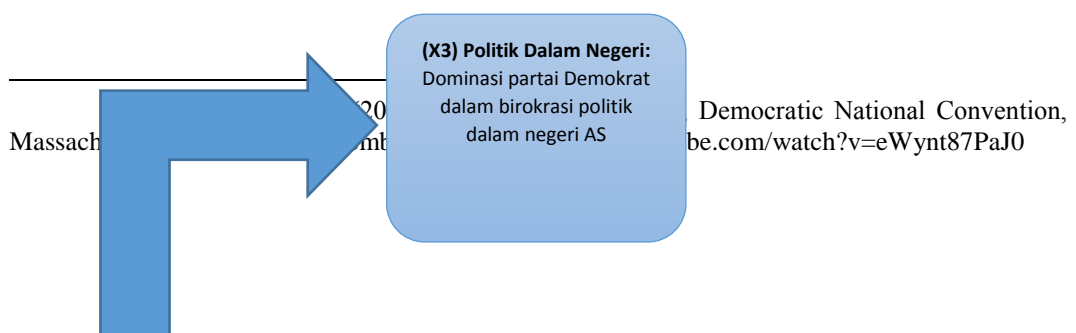
¹⁰⁵ Christopher Blanchard, *Afghanistan: Narcotics and US Policy*, Congressional Research Service, (Washington SC) 2009, 1.

petani Afghanistan, LSM, serta orang-orang yang ahli pada bidang agrikultural.¹⁴⁰



5. Interaksi antar Konsep dalam Proses Perubahan Kebijakan *War on Drugs* pada Masa Pemerintahan Obama

Gambar 4.6: Interaksi antar variabel (X) dalam memengaruhi perubahan kebijakan *War on Drugs* AS (Y)



Pada konsep X3, peneliti menemukan adanya pengaruh partai Demokrat sebagai *Partisan Influencers* dalam jajaran kongres AS sekaligus *Department of State*. Variabel X1 di sini sangat memengaruhi X3 karena pada variabel X1, fenomena narkoterorisme dan penemuan jalur distribusi Afrika menarik perhatian para kader Demokrat dalam lembaga legislatif dan eksekutif AS untuk mengkritik serta memberi rekomendasi kepada X2 sebagai pengambil keputusan. Suara mayoritas kader-kader Demokrat yang berperan sebagai *partisan influencers* di kongres dan *Department of State* menghasilkan rekomendasi untuk dihapuskannya pendekatan eradikasi dan menggantinya dengan kontra narkoterorisme serta pengembangan alternatif.

Pada determinan ekonomi & militer sebagai konsep X4, superioritas militer AS secara kuantitas dan kualitas di Afghanistan mendorong terjadinya perubahan pendekatan interdiksi ke arah kontra narkoterorisme. Secara kuantitas, pasukan militer AS telah tersebar di Afghanistan untuk memerangi Taliban. Secara kualitas, para prajurit AS dilengkapi dengan alutsista superior yang mampu dimanfaatkan untuk menjalankan operasi interdiksi kontra-narkoterorisme.

Selanjutnya konsep X3 dan konsep X4 sama-sama memengaruhi konsep X2. Pada konsep X2, Obama berperan sebagai pengambil keputusan. Personalitas politik Obama yang terbuka memungkinkan Obama untuk mempertimbangkan saran dan kritik dari birokrasinya serta para akademisi. Pandangan Obama yang lebih rasional terhadap

Mengacu pada konsep perubahan kebijakan luar negeri dari Charles F. Herman, peneliti mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada kebijakan *war on drugs* AS termasuk dalam tingkat *program changes*. Selaras dengan proses pengambilan keputusan politik luar negeri Coplin, *program changes* pada kebijakan *war on drugs* dipengaruhi oleh beberapa agen perubahan utama (*primary change agents*). Pertama kepemimpinan Obama sebagai *leader driven*. Obama sebagai presiden AS memiliki visi untuk menggabungkan isu terorisme dan narkoba sebagai jalan keluar dalam menangani krisis opium di AS. Di samping itu, gaya kepemimpinannya yang kolaboratif membuat Obama sebisa mungkin menempuh jalur persuasif dalam memberantas opium Afghanistan. Kedua, kongres dan eksekutif AS yang didominasi partai Demokrat berperan sebagai *Bureaucratic Advocacy*. Agen perubahan ini berfungsi memengaruhi pengambil keputusan dengan berbagai macam informasi dan pertimbangan sebelum mengambil suatu keputusan. Ketiga, fenomena narkoterorisme dan jalur distribusi Afrika berperan sebagai *external shock*. Narkoterorisme dan penemuan jalur baru di Afrika menjadi peristiwa eksternal yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah AS.

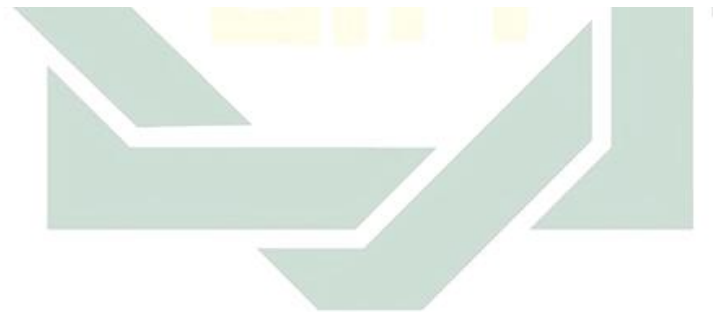
Dengan adanya agen-agen perubahan tersebut, maka pemerintah AS memutuskan untuk mengubah program dalam kebijakan *war on drugs* AS di Afghanistan. Pada tingkat *program changes*, terjadi perubahan terhadap pendekatan-pendekatan kebijakan *war on drugs* AS,

B. Saran

Bagaimanapun juga peneliti menyadari bahwasannya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Analisa yang dilakukan peneliti bisa saja masih meninggalkan celah-celah penelitian yang sebenarnya perlu dianalisa lebih lanjut. Namun keterbatasan akses terhadap tempat, waktu, serta data penelitian menghalangi peneliti untuk mencapai kesempurnaan sedemikian rupa. Namun peneliti memiliki saran untuk pihak-pihak selanjutnya yang mempunyai minat untuk meneliti topik serupa. Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk lebih mengeksplor keterkaitan politik dalam negeri dari AS maupun Afghanistan dengan industri opium. Akan lebih baik bila menggunakan varian konsep atau teori lain agar memperluas perspektif dalam mempelajari isu tersebut. Juga dengan semakin kompleksnya isu Afghanistan, tentu akan sangat menarik bila terdapat penelitian terkait perkembangan kebijakan *War on Drugs* AS pada masa pemerintahan Joe Biden terhadap industri opium di Afghanistan.

Di samping itu, peneliti menyarankan pemerintah Indonesia agar lebih fokus terhadap problematika narkoba di Indonesia. Dari hasil penelitian ini, peneliti menyadari bahwa krisis narkoba tidak akan berhasil diatasi bila hanya menitikberatkan pada aspek persediaan (*supply*) saja. Namun permintaan (*demand*) justru menjadi aspek yang paling penting untuk mampu memberangus industri narkoba secara total. Berdasarkan pengalaman peneliti menjalankan magang di Badan Nasional Narkotika

Provinsi Jawa Timur (BBNP Jatim), penegak hukum Indonesia terlalu berfokus pada operasi interdiksi sehingga melupakan pengembangan kesejahteraan masyarakat akar rumput. Dalam penelitian ini, kebijakan *War on Drugs* AS dapat menjadi contoh bagi kebijakan *War on Drugs* Indonesia untuk lebih berfokus pada pengembangan alternatif dalam bentuk bantuan profesi alternatif bagi para petani ganja di Aceh, maupun sosialisasi akan bahaya industri narkoba di wilayah pedesaan Indonesia. Strategi semacam ini sangat krusial demi menekan persediaan dan permintaan (*supply & demand*) barang haram tersebut.



- Crescent.” *Harm Reduction Journal* 14, no. 1 (2017): 47. <https://doi.org/10.1186/s12954-017-0170-1>.
- Felbab-Brown, Vanda. “Peacekeepers among Poppies: Afghanistan, Illicit Economies and Intervention”. *International Peacekeeping*, Vol. 16, Issue 1
- Felbab-Brown, Vanda. *Shooting Up: Counterinsurgency and the War on Drugs*. Washington: Brookings Institution Press, 2009
- Government of Afghanistan Ministry of Counter Narcotics. “Afghanistan Drugs Use Survey 2005”
- Hartelius, Jonas. “Narco-terrorism”. Policy Paper. 2008
- Hamilton, L. *How Congress Works and Why You Should Care*. Indiana University Press, 2004. <https://books.google.co.id/books?id=niCHAAAAMAAJ>.
- Hermann, Margaret G. “Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders.” *International Studies Quarterly* 24, no. 1 (1980): 7. <https://doi.org/10.2307/2600126>.
- Livingston, Ian S, Heather L Messera, and Michael O Hanlon. “Afghanistan Index 209.” *Iraq*, 2010, 48. <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/index20091222-1.pdf>.
- Mansfield, David. “The Helmand Food Zone: The Illusion of Success”, Afghanistan Research & Evaluation Unit (AREU). 2019
- N. Rosenau, James. *Pre-Theories and Theories of Foreign Policy*. Northwestern University Press.
- Obama, Barack. *Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance*. New York: Three Bara Rivers. 2004.
- Pfiffner, James P. “George W. Bush: Policy, Politics, and Personality.” *The School of Public Policy*, 2003, 161–81.
- Peters, Gretchen. *How Opium Profits the Taliban*, Washington D.C, US Institute for Peace. 2009
- Schewich, Thomas. “US Counternarcotics Strategy for Afghansitan”. U.S Departement of State. 2007
- UNODC. “Addiction, Crime and Insurgency: The Transnational threat of Afghan Opium”. UNODC Research. 2009
- Keane, Conor. “The Impact of Bureaucratic Conflict on US Counternarcotics

- Hemming, Joe. "US and Afghan meets on aerial poppy spray". Reuters. Diakses 17 Maret 2021. <https://www.reuters.com/article/us-afghan-drugs-idUSISL10021720071008>
- "Overwhelmed by Opium". The Washington Post. Diakses 19 Oktober 2021, <https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-opium-poppy-production/>
- "Opium: Afghanistan's drug trade that helped fuel the Taliban". *AL-Jazeera News*. Diakses 4 Agustus 2021, Opium: Afghanistan's drug trade that helped fuel the Taliban | Business and Economy News | Al Jazeera
- Thompson, Ginger & J. Rubin, Alissa. "Sanctions Placed on Afghan Exchange". The New York Times. Diakses pada 9 Agustus 2021. <https://www.nytimes.com/2011/02/19/world/asia/19ansari.html>
- U.S Department of State. "Eradication & Interdiction". Diakses 26 Maret 2021. [https://20092017.state.gov/j/inl/focus/counternarcotics/eradication/index.htm#:~:text=The%20eradication%20\(the%20physical%20destruction,States%2C%20or%20other%20drug%20markets](https://20092017.state.gov/j/inl/focus/counternarcotics/eradication/index.htm#:~:text=The%20eradication%20(the%20physical%20destruction,States%2C%20or%20other%20drug%20markets)
- United Nations of the Rule of Law. "Drug Trafficking" Diakses 26 Maret 2021. <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/transnational-threats/drug-trafficking/#:~:text=Drug%20trafficking%20is%20a%20global,subject%20to%20drug%20prohibition%20laws>
- United Nations Office on Drugs and Crime. "Legal Framework for Drug Trafficking," n.d. <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/legal-framework.html>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. "Legal Framework for Drug Trafficking," n.d. <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/legal-framework.html>.
- UNODC. "'Opium Production in Afghanistan Shows Increase, prices set rise". Diakses 22 Oktober 2021. <https://www.unodc.org/afghanistan/en/october/2011/opium-production-in-afghanistan-shows-increase.html>
- U.S Department of State. "Release of 2009 International Narcotics Control Strategy Report". Diakses 9 Oktober 2021. <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/rm/119890.htm>

- USAID. "Afghanistan Agriculture". Diakses 09 Agustus 2021, <https://www.usaid.gov/afghanistan/agriculture>
- Risen, James. "Propping Up a Drug Lord, Then Arresting Him". New York Times. Diakses 12 September 2021. <https://www.nytimes.com/2010/12/12/world/asia/12drugs.html>
- Wihbey, John. "Heroin Use in U.S: Data and Resources". The Journalist's Resource. Diakses 17 Agustus 2021. <https://journalistsresource.org/criminal-justice/heroin-use-in-the-united-states-data-and-recent-trends/>
- T. Johnson, David. "Release of 2009 International Narcotics Control Strategy Report". Department of State. Diakses 10 Oktober 2021. <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/rm/119890.htm>
- "Timeline: U.S Military Presence in Afghanistan". Al-Jazeera News. Diakses 7 September 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2019/9/8/timeline-us-military-presence-in-afghanistan>
- Marannis, David. "Though Obama had to leave to found himself, It Is Hawaii That made his rise possible". Diakses 19 September 2021. https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/22/AR2008082201679_pf.html
- Karmini, Niniek. "President's Obama transgender childhood nanny in Indonesia, Evie, lives as outcast" New York Daily News. Diakses 26 Oktober 2021. <https://www.nydailynews.com/news/world/president-obama-transgender-childhood-nanny-indonesia-evie-lives-outcast-article-1.1033301>
- Vox "Obama on his goal on foreign policy". Diakses 20 Oktober 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=Icq60Uxd3As&t=124s>
- The White House. "Collaboration". Diakses 18 Oktober 2021. <https://obamawhitehouse.archives.gov/open/collaboration>
- Warren, James. "Organizer's Influencer Helped Shape Obama" The New York Times. Diakses 4 Oktober 2021, <https://www.nytimes.com/2010/10/17/us/17cncwarren.html>